

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ukuran penting dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah menunjukkan adanya hasil dari pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan. Pertumbuhan ekonomi dapat dimaknai sebagai suatu keadaan yang ditandai dengan peningkatan berkelanjutan dalam produksi barang dan jasa pada wilayah tertentu. Kenaikan jumlah output yang dihasilkan dalam periode tertentu mencerminkan dinamika pertumbuhan ekonomi tersebut. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara berkesinambungan menjadi perhatian utama bagi setiap negara, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Nurhuda et al., n.d.).

Secara ringkas, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai proses peningkatan output per kapita dalam jangka panjang. Definisi ini menekankan tiga elemen utama, yaitu proses, output per kapita, dan dimensi waktu jangka panjang. Pertumbuhan sebagai suatu proses menunjukkan bahwa fenomena ini tidak dapat dinilai hanya pada satu titik waktu tertentu, melainkan harus dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam aspek output per kapita, terdapat dua komponen yang perlu diperhatikan, yakni total output (GDP) dan jumlah penduduk, karena output per kapita diperoleh dari pembagian antara keduanya. Sementara itu, aspek jangka panjang mengandung makna bahwa peningkatan output per kapita harus dianalisis dalam periode waktu yang relatif panjang, seperti 10, 20, hingga 50 tahun atau lebih (Ivonia Auxiliadora Freitas Marcal et al., 2024).

Berbagai faktor makroekonomi turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain investasi, konsumsi rumah tangga, aktivitas perdagangan internasional (ekspor dan impor), serta pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini, intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal memiliki peranan penting,

khususnya di tingkat daerah. Dalam sistem desentralisasi fiskal, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan menjadi indikator penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendapatan daerah bersumber dari PAD serta transfer pemerintah pusat yang mencakup DAU, DAK, dan DBH. Selain itu, efektivitas realisasi belanja daerah yang diarahkan pada kegiatan produktif akan berdampak pada peningkatan produksi, penciptaan kesempatan kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Berbagai faktor makroekonomi turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain investasi, konsumsi rumah tangga, aktivitas perdagangan internasional (ekspor dan impor), serta pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini, intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal memiliki peranan penting, khususnya di tingkat daerah. Dalam sistem desentralisasi fiskal, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan menjadi indikator penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendapatan daerah bersumber dari PAD serta transfer pemerintah pusat yang mencakup DAU, DAK, dan DBH. Selain itu, efektivitas realisasi belanja daerah yang diarahkan pada kegiatan produktif akan berdampak pada peningkatan produksi, penciptaan kesempatan kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

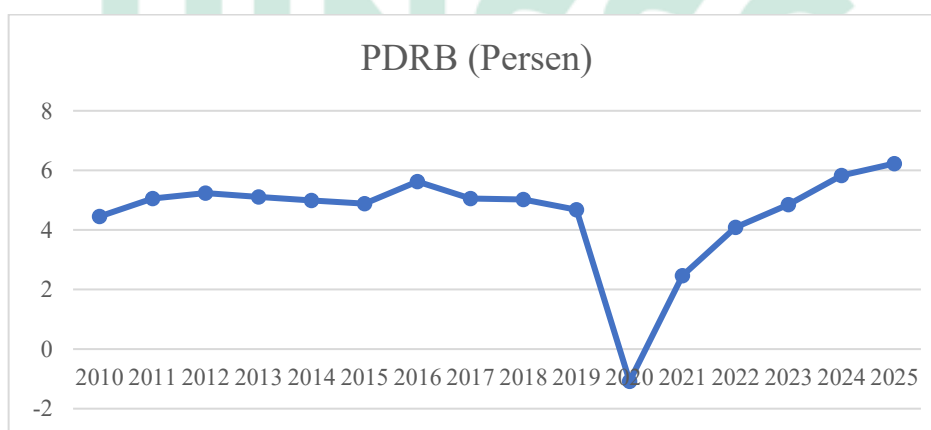
Dalam perspektif regional, pertumbuhan ekonomi daerah merupakan indikator keberhasilan pembangunan yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga konstan maupun harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku berfungsi untuk melihat struktur serta dinamika perekonomian. PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan nilai tambah barang dan jasa dengan menggunakan harga pada tahun dasar tertentu.

Perubahan nilai PDRB tidak terjadi secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor fiskal daerah, terutama PAD, Dana Perimbangan, dan realisasi belanja daerah sebagai sumber pembiayaan

sekaligus penggerak aktivitas ekonomi. PAD dan Dana Perimbangan berfungsi sebagai sumber pendanaan pembangunan, sedangkan belanja daerah menjadi instrumen kebijakan dalam menyalurkan dana ke sektor-sektor produktif. Dengan demikian, ketiga komponen tersebut secara langsung memengaruhi fluktuasi PDRB serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam implementasinya, hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan realisasi belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diamati secara nyata di Kabupaten Cirebon. Sebagai daerah dengan posisi strategis di jalur Pantura dan potensi ekonomi yang beragam, capaian PDRB Kabupaten Cirebon selama periode 2015–2024 menunjukkan dinamika yang berfluktuasi. Fluktuasi tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi eksternal, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola PAD sebagai sumber pendapatan mandiri, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, serta efektivitas realisasi belanja daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi sektor riil. Oleh karena itu, fenomena pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon menjadi relevan untuk dianalisis lebih lanjut dengan menempatkan PAD, Dana Perimbangan, dan Realisasi Belanja Daerah sebagai faktor utama yang memengaruhi kinerja PDRB daerah. Berikut data Angka PDRB berdasarkan harga berlaku sebagai indikator Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Cirebon Tahun 2010-2025

Grafik 1. 1
Perkembangan Angka PDRB di Kabupaten Cirebon Tahun 2010-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon data diakses dan diolah pada 24 Oktober 2025.

Berdasarkan grafik 1.1 PDRB (persen) menunjukkan dinamika yang berfluktuasi selama periode 2010-2025. Pada periode 2015–2019, pertumbuhan ekonomi relatif stabil dengan rata-rata di atas 5%. Namun, menjelang 2019 terjadi perlambatan hingga 4,68% akibat melemahnya investasi dan daya saing sektor industri pengolahan. Tahun 2020 menjadi titik terendah dengan kontraksi –1,08% sebagai dampak langsung pandemi COVID-19 yang menghentikan aktivitas ekonomi di berbagai sektor utama. Memasuki 2021, perekonomian mulai pulih dengan pertumbuhan 2,47% dan meningkat signifikan hingga mencapai 5,83% pada 2024. Pemulihan ini ditopang oleh pelonggaran mobilitas, stimulus fiskal, peningkatan konsumsi masyarakat, serta didorong kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.

Selain perkembangan PDRB, pemerintah daerah juga menetapkan target Laju Pertumbuhan Ekonomi sebagai indikator keberhasilan pembangunan daerah. Berdasarkan data tahun 2015–2024, realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon tidak selalu sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2015 target LPE sebesar 5,35% dengan realisasi 4,88%, sedangkan pada tahun 2016 realisasi mampu melampaui target yaitu 5,63% dari target 5,40%. Namun pada tahun 2017 hingga 2019 realisasi kembali berada di bawah target, masing-masing sebesar 5,06%, 5,02%, dan 4,86% dari target yang ditetapkan di atas 5%. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19, dimana target -1,08% namun realisasi menurun lebih dalam menjadi -1,69%.

Memasuki masa pemulihan ekonomi, pada tahun 2021 realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi kembali melampaui target yaitu 4,85% dari target 4,38%. Namun pada tahun 2022 dan 2023 realisasi kembali lebih rendah dari target, yaitu 4,09% dan 3,87%. Sementara itu pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan dengan realisasi 5,83%,

melampaui target 5,0%. Jika dikaitkan dengan grafik PDRB sebelumnya, perbedaan antara target dan realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon masih berfluktuasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk efektivitas kebijakan fiskal daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Kebijakan fiskal tersebut tercermin melalui kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah, dana transfer dari pemerintah pusat, serta realisasi belanja daerah, yang selanjutnya berpengaruh terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan fiskal menjadi faktor penting dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah sebagai upaya untuk mencapai arah perekonomian agar tumbuh menjadi lebih baik (Ompusunggu et al 2024). Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui instrumen penerimaan (*revenue*) dan pengeluaran (*expenditure*) negara untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di Indonesia, kebijakan fiskal tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (Arina et al., 2019). APBD memiliki 3 faktor penting yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan pendapatan sah lainnya.

PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal secara mandiri, sedangkan dana perimbangan merupakan bentuk transfer dari pemerintah pusat sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal. Adapun dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana- dana transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Sinaga et al., 2022). Di sisi lain, realisasi belanja daerah berperan sebagai penggerak awal (stimulus) dalam perekonomian, terutama ketika sektor swasta belum mampu berperan secara optimal. Besarnya realisasi belanja

daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penggunaan belanja daerah yang difokuskan pada kegiatan produktif, khususnya di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik, mampu meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, dan mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Kondisi ini selanjutnya akan merangsang pertumbuhan investasi, penyerapan tenaga kerja, serta aktivitas ekonomi, sehingga mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemilihan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dalam penelitian ini didasarkan pada kondisi nyata Kabupaten Cirebon yang hingga saat ini masih menghadapi permasalahan rendahnya kemandirian fiskal. Kemampuan fiskal Kabupaten Cirebon masih tergolong rendah, dengan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat mencapai lebih dari 80 persen dari total pendapatan daerah (Suara Cirebon, 2026). Kondisi ini mencerminkan bahwa PAD Kabupaten Cirebon belum mampu menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang memadai secara mandiri. Padahal, secara teoritis, PAD merupakan cerminan kemampuan suatu daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Teori desentralisasi fiskal menegaskan bahwa pemerintah daerah yang mampu memaksimalkan PAD akan lebih efisien dalam menyediakan layanan publik sesuai kebutuhan masyarakat setempat, sehingga berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Adapun pemilihan Dana Perimbangan sebagai variabel penelitian dilatarbelakangi oleh besarnya peran dana transfer tersebut dalam struktur keuangan Kabupaten Cirebon. Data menunjukkan bahwa Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Cirebon terus meningkat dari Rp773,11 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp3.142,05 miliar pada tahun

2024, jauh melampaui PAD yang hanya sebesar Rp772,49 miliar di tahun yang sama. Dominasi Dana Perimbangan ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Cirebon sangat bergantung pada transfer fiskal dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan daerah. Kondisi tersebut senada dengan temuan bahwa dari 508 daerah di Indonesia, hanya 4,3 persen yang ketergantungannya pada transfer dari pemerintah pusat tergolong rendah (di bawah 50 persen). Secara teoritis, dana perimbangan merupakan instrumen desentralisasi fiskal yang dirancang untuk memperkecil kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Teori *fiscal federalism* juga menegaskan bahwa transfer antar pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung kapasitas belanja daerah, yang pada akhirnya dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Belanja Daerah dipilih sebagai variabel penelitian karena merupakan instrumen kebijakan fiskal yang secara langsung bersentuhan dengan aktivitas perekonomian masyarakat di Kabupaten Cirebon. Realisasi belanja daerah Kabupaten Cirebon terus mengalami peningkatan dari Rp1.354,73 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp4.608,56 miliar pada tahun 2024. Namun, besarnya realisasi belanja tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, mengingat sebagian besar belanja masih terserap untuk belanja pegawai yang mencapai 47,1 persen dari total APBD 2026 atau senilai Rp2,04 triliun sehingga ruang untuk belanja produktif di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi terbatas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas belanja daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi riil. Secara teoritis, teori Keynes tentang pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) menjelaskan bahwa belanja pemerintah memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian; peningkatan belanja pemerintah akan mendorong permintaan agregat, merangsang produksi, menyerap tenaga kerja, dan pada

akhirnya meningkatkan output perekonomian. Wagner's Law juga mengemukakan bahwa semakin berkembang suatu perekonomian, semakin besar pula proporsi pengeluaran pemerintah yang dibutuhkan untuk mendorong pembangunan.

Berikut data perkembangan perekonomian dari segi pendapatan daerah dana perimbangan dan realisasi belanja daerah pada Kabupaten Cirebon dari tahun 2015 hingga tahun 2024.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2015-2024

TAHUN	Pendapatan Asli Daerah (Milyar Rp)	Dana Perimbangan (Milyar Rp)	Realisasi Belanja Daerah (Milyar Rp)
2010	139,42	1.483,38	1.488,74
2011	1.994,27	1.099,40	1.749,53
2012	1.781,24	1.327,56	2.033,14
2013	2.316,01	1.488,07	2.324,46
2014	1.994,27	1.583,73	2.566,95
2015	3.161,71	1.619,68	1.354,73
2016	3.326,41	2.441,33	3.419,43
2017	3.591,54	2.442,51	3.589,09
2018	3.683,07	2.476,42	3.681,47
2019	4.014,47	2.654,99	4.025,76
2020	3.770,70	2.505,31	3.694,21
2021	3.955,69	2.616,12	3.942,81
2022	3.960,95	2.706,57	3.988,92
2023	3.717,74	2.670,89	3.799,67
2024	4.464,64	3.142,05	4.608,56
2025	4.360,96	3.125,44	4.281,02

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan data diakses dan dioalah pada 16 Desember 2025.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon pada periode 2010 hingga 2025 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi dan belum sepenuhnya stabil sebagai sumber pendanaan utama daerah. PAD pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp.319,89 miliar dan meningkat signifikan hingga Rp.779,33 miliar pada tahun 2017, namun kembali menurun pada tahun 2018 menjadi Rp.584,81 miliar dan tahun 2020 sebesar Rp.615,52 miliar, sebelum meningkat kembali hingga Rp.772,49 miliar pada tahun 2024. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa

kemampuan daerah dalam menggali potensi pendapatan masih menghadapi keterbatasan, sehingga kemandirian fiskal Kabupaten Cirebon belum optimal. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu membiayai pembangunan secara mandiri dan membuka ruang ketergantungan terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat.

Ketergantungan terhadap pemerintah pusat tersebut tercermin dari besarnya Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Cirebon dibandingkan dengan PAD. Pada tahun 2015, Dana Perimbangan tercatat sebesar Rp.773,11 miliar dan meningkat tajam pada tahun 2016 menjadi Rp.2.441,33 miliar, serta cenderung terus meningkat hingga mencapai Rp.3.142,05 miliar pada tahun 2024. Dominasi Dana Perimbangan dalam komposisi pendapatan daerah menunjukkan bahwa kontribusi transfer pemerintah pusat masih sangat signifikan. Meskipun keberadaan Dana Perimbangan memberikan fleksibilitas fiskal yang lebih besar bagi daerah, ketergantungan yang berlebihan dapat menjadi risiko apabila tidak diimbangi dengan penguatan kemandirian fiskal dan optimalisasi pengelolaan anggaran secara efektif. Oleh karena itu, dana transfer yang besar perlu dikelola secara optimal agar mampu memberikan dampak nyata terhadap perekonomian daerah.

Sebagai bentuk pemanfaatan PAD dan Dana Perimbangan, pemerintah daerah merealisasikannya melalui Belanja Daerah yang berfungsi sebagai instrumen utama dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Realisasi belanja daerah Kabupaten Cirebon pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp.1.354,73 miliar dan meningkat secara bertahap hingga mencapai Rp.4.608,56 miliar pada tahun 2024, meskipun pada tahun 2020 dan 2023 mengalami penurunan. Peningkatan belanja daerah seharusnya mampu mendorong aktivitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, fluktuasi belanja serta belum optimalnya alokasi pada sektor-sektor produktif menunjukkan bahwa besarnya belanja daerah belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Cirebon. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam efektivitas belanja daerah sebagai penggerak utama perekonomian.

Penelitian yang dilakukan oleh (Saraswati, 2017) menunjukkan bahwa secara simultan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal, memberikan pengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Hartadi, 2022) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kota-kota dalam wilayah Jawa Timur. Namun demikian, hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian (Taher & Tuasela, 2019) yang menyatakan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal pemerintah daerah melalui APBD di Kabupaten Mimika belum mampu secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian oleh (Mononimbar et al., 2017) turut menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan belanja daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Selatan.

Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan adanya perbedaan karakteristik daerah, struktur keuangan daerah, serta efektivitas pengelolaan anggaran. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada wilayah atau periode tertentu, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi daerah dengan tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi dan fluktuasi kinerja ekonomi seperti Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan realisasi belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon secara komprehensif dalam periode pengamatan yang relatif panjang, guna memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian

ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Realisasi Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Cirebon tahun 2010-2025.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang ada pada penelitian kali ini adalah:

1. Faktor internal yang diduga memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon selama periode 2010–2025 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta Realisasi Belanja Daerah.
2. Selama periode 2010 hingga 2025, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon mengalami dinamika yang tidak stabil, ditandai dengan adanya fluktuasi dari tahun ke tahun.
3. Pertumbuhan ekonomi daerah tidak selalu bergerak searah dengan peningkatan pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai faktor fiskal mana yang paling berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator kemandirian fiskal tidak selalu memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi apabila pengelolaannya belum dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
5. Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat berpotensi memengaruhi kemandirian fiskal daerah serta efektivitas pelaksanaan pembangunan ekonomi.
6. Realisasi belanja daerah belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal dalam mendorong aktivitas ekonomi produktif di daerah.
7. Keterkaitan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan realisasi belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan temuan yang bervariasi dalam berbagai penelitian sebelumnya, sehingga masih memerlukan pengujian empiris lanjutan.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dan fokus pada penelitian serta mencegah penyimpangan dari tujuan pokok penelitian dan mempermudah dalam mendapatkan informasi maupun data yang dibutuhkan. Oleh karena itu penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut ini:

1. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Realisasi Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2. Pengukuran pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan.
3. Penelitian ini difokuskan pada Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai objek penelitian.
4. Periode penelitian dibatasi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2025.
5. Penelitian ini tidak memasukkan variabel lain di luar yang diteliti, seperti konsumsi rumah tangga, investasi, kegiatan ekspor-impor, tenaga kerja, tingkat pendidikan, serta faktor nonfiskal lainnya yang juga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

D. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon?
2. Apakah Dana Perimbangan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon?
3. Apakah realisasi belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan realisasi belanja daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon periode 2010-2025.
2. Menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon selama periode 2010-2025
3. Menganalisis pengaruh realisasi belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon pada periode 2010-2025.
4. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan realisasi belanja daerah secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon selama periode 2010-2025.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan pembaca, serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji.

2. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa bukti empiris kepada pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan secara efektif guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran dalam mengidentifikasi dan menganalisis berbagai permasalahan daerah, sehingga dapat memperluas pengetahuan, khususnya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan realisasi belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

F. Sistematika penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bagian ini mencakup bahasan mengenai landasan teori yang relevan dengan penulisan pada penelitian ini. Selain berisi landasan teori yang relevan, terdapat pula penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis dari penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian dan unit observasi, sumber dan jenis data yang digunakan, metode pengumpulan data, mencantumkan definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan pada penelitian serta menguraikan berbagai jenis uji yang digunakan dalam mendukung penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bagian ini menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah. Diawali dengan gambaran umum mengenai objek kemudian ditampilkan hasil analisis statistik beserta penjelasannya. Pembahasan dapat ditambahkan dengan mengaitkan hasil dari penelitian dengan teori maupun temuan dari berbagai hasil penelitian terdahulu guna memperkuat hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi rangkuman secara keseluruhan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, implikasi, serta saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan guna keperluan yang terkait dengan pembahasan pada penelitian ini.